

MUNCULNYA ELITE BARU DI MALUKU UTARA 1925-1942

The Emergence of New Elites in North Molucas 1925 -1942

Syahril Muhammad¹, Soegiyanto Padmo¹

Program Studi Sejarah

Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This study aims at describing the emergence of the new elites in North Malucas in 1925 -1942 through a historical approach. The research focuses on the status of the new elites and social change. The temporal scope of the research is that of around 1925 -1942. The year 1925 chosen as starting point of the research is based on the reason that from that time there was an extension of area for the direct system of the government in North Molucas. While 1942 taken as the end of the time limit of this research is based on the reason that in this time the dualistic system of the governmental bureaucracy ended in the North Molucas.

The emergence of the elites in North Molucas was a positive impact of the development done by the colonial government. The opening of educational institutions had offered new opportunities to make the people there realize to develop themselves and accelerate the development in general. Through the education, the people could get the suitable job and income based on their professionals. This condition had given a positive implication for the people there in improving their social status.

The result of the research shows that the presence of Dutch in North Molucas had brought the social change in the society. The social change happened accordance with the Dutch colonial efforts to open the schools in this region. The aims of these colonial efforts were to provide the colonial administrators for the structure of the colonial bureaucracy.

The result of the development of economy and western education system produced a new social class in the society that was modern elite group in the society. This modern elite group belonged to the educated one occupying the middle class of the society in North Molucas who had become the motivators in mobilizing the social change there in that time.

Keywords: *New Elites and Social mobility*

1. *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

PENGANTAR

Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia di tanah jajahan Hindia Belanda mulai mengalami perubahan. Perubahan ini diakibatkan oleh modernisasi yang mengubah masyarakat tradisional ke arah modern, mendapat dorongan kuat dari pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Tersedianya berbagai sarana seperti transportasi, komunikasi, birokratisasi, serta pendidikan yang diadakan pada saat itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Sisi lain, pergolakan dan perubahan struktur sosial, yang menyangkut status dan fungsi, mulai terjadi.¹ Dalam situasi seperti ini, tidak dapat dipungkiri munculnya golongan terpelajar yang berpendidikan Barat, yaitu golongan elite modern, yang aktif melakukan perubahan dan mendorong masyarakatnya ke arah kemajuan.²

Kehadiran Belanda di Ternate membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan ini terjadi sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial melalui pembukaan sekolah-sekolah di Ternate. Usaha-usaha ini dilakukan bertujuan menyiapkan tenaga-tenaga administratif untuk ditempatkan dalam struktur birokrasi kolonial. Dampak dari usaha tersebut melahirkan kelompok-kelompok sosial baru atau elite modern. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Robert Van Niel bahwa perkembangan elite Indonesia adalah yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan pendidikan. Menurutnya, munculnya elite modern Indonesia adalah konsekuensi logis dari politik etis yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu usaha bagian utama dari program Pemerintah Kolonial Belanda.³ Di samping itu, pula menurut Jangam, sirkulasi dalam pengertian sederhana juga berarti satu mobilitas sosial yaitu mobilitas elite dari satu kelas ke kelas lain, dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Dalam setiap masyarakat, golongan elitnya secara terus-menerus selalu mencoba mengubah posisi kelas mereka, dan karena itu, selalu terjadi gerakan perubahan antara golongan elite dengan non-elite, dan antara elite dengan elite.⁴

Pendidikan Barat dalam perkembangannya memiliki daya tarik tersendiri karena memperoleh prioritas untuk mendapatkan posisi dalam kelembagaan dan kekuasaan. Sistem pendidikan Barat dan birokrasi kolonial yang mengarah ke birokrasi modern itu memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Golongan terpelajar secara berlahan-lahan ingin menduduki posisi yang sama dengan golongan aristokrat walaupun politik kolonial ingin mempertahankan struktur yang ada. Perubahan-perubahan dari birokrasi tradisional ke birokrasi kolonial menyebabkan

terjadinya mobilitas sosial. Hal ini tampak pada pergeseran sistem sosial, strata ekonomi, dan posisi politik.⁵

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti karena diterapkannya kebijakan pemerintah kolonial tentang pembinaan dan rekrutmen para elite pribumi di Maluku Utara, telah memunculkan kelompok sosial baru yang membawa perubahan dalam berbagai aspek, antara lain perubahan orientasi, sikap, dan perilaku. Hal ini tampak pada gaya hidup bangsawan dan kelompok intelektual Maluku Utara.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kedudukan elite baru dalam birokrasi pemerintahan kolonial di Ternate?

Kedua, sejauh mana pengaruh elite baru terhadap perubahan sosial di Ternate?

Mengingat panjang rentang waktu bahasan dan kompleksnya permasalahan yang muncul, perlu diadakan pembatasan. Pembatasan ini sekaligus pula dilakukan untuk menghindarkan penulisan dari kesalahan memperpanjang cerita yang cenderung untuk menguraikan kisah melampaui batas semestinya.⁶ Untuk ruang lingkup temporal, penelitian ini berkisar antara tahun 1925-1942. Pemilihan tahun 1925 sebagai awal bahasan didasarkan atas pertimbangan bahwa pada tahun tersebut di Maluku Utara terjadi perluasan kawasan pemerintahan langsung.⁷ Pemilihan tahun 1942 sebagai batasan akhir penelitian karena pada tahun tersebut ditandai dengan berakhirnya sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat dualistis di Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang digolongkan kepada sejarah lokal,⁸ yaitu kisah masa lampau dari kelompok masyarakat yang berada pada daerah geografis yaitu daerah Ternate.

Berkenaan dengan topik dan lingkup penelitian yang difokuskan pada upaya pengungkapan sejarah itu, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah.⁹

Metode penelitian sejarah adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan sebuah penelitian sejak dari persiapan hingga selesai penyusunan hasil akhir dalam bentuk laporan penelitian.

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan sumber (heuristik). Pada proses heuristik ini, sumber-sumber yang dikumpulkan

terdiri atas sumber primer dan sekunder yang dipilih dari hasil pelacakan di berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Di antara sumber-sumber primer mengenai Ternate pada periode kolonial yang lebih bersifat resmi adalah Memori Serah Jabatan (*Memori van Overgave* atau MVO) dari seorang residen dan asisten residen atau kontrolir yang telah mengarahiri masa jabatannya.

Langkah kedua adalah melakukan penilaian (kritik) terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan baik secara ekstern maupun intern.¹⁰ Kritik ekstern dilakukan terhadap bahan material dokumen seperti pada kertas dan tinta yang digunakan untuk memperoleh kepastian bahwa bahan tersebut benar berasal dari zamannya (asli).

Langkah ketiga, dilakukan interpretasi atau analisis guna memperoleh sejumlah fakta yang terkandung dalam berbagai dokumen. Fakta tersebut kemudian dirangkai dalam satu kesatuan yang serasi dan logis sehingga menghasilkan cerita sejarah.¹¹ Karya sejarah yang baik tidak hanya tergantung pada kemampuan mereka meneliti sumber sejarah, melainkan juga membutuhkan kemampuan imajinasi untuk menguraikan kisah historis secara terperinci.¹² Penyajiannya dalam bentuk penulisan pemikiran baru disimpulkan demikian rupa guna memperoleh realitas masa lampau tentang munculnya elite baru di Maluku Utara.

KERANGKA TEORI DAN PENDEKATAN

Studi ini bertujuan mewujudkan hasil penulisan yang kritis dan ilmiah mengenai salah satu aspek sejarah lokal, yakni munculnya elite baru Ternate 1925 -1942. Untuk mencapai tujuan itu, maka digunakan alat-alat analisis, yakni konsep dan teori yang sesuai. Betapa pentingnya landasan teori dalam upaya mewujudkan suatu karya ilmiah telah dikemukakan oleh para ahli. Pada intinya, dikatakan bahwa teori merupakan alat terpenting dalam kegiatan ilmiah. Teori bukan saja diperlukan dalam menyimpulkan generalisasi-generalisasi yang dapat diambil berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan, tetapi juga dalam memberi kerangka orientasi untuk mengklasifikasikan dan menganalisis fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian. Kecuali itu, teori mampu memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi dalam mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada dan akan terjadi.¹³

Dalam melukiskan munculnya elite baru di Maluku Utara tidak hanya penggambaran secara kronologis saja, tetapi diperlukan suatu peristiwa sejarah yang bersifat kompleks dapat diperoleh dengan

menggunakan suatu pendekatan dari ilmu sosial.¹⁴ Penggunaan pendekatan ini menuntut sejarawan untuk menggunakan teori dan konsep dari disiplin sosial lainnya, baik sosiologis¹⁵, antropologis, dan ilmu politik merupakan pendekatan-pendekatan penting bagi penelitian ini. Pendekatan sosiologis dimanfaatkan antara lain dalam memahami kelompok-kelompok sosial yang berperan dan hubungan antar kelompok. Pendekatan antropologis digunakan dalam mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku-perilaku tokoh-tokoh tertentu, masalah status, dan sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup mereka. Dalam menyoroti struktur kekuasaan dan hierarki kepemimpinan, pendekatan politikologis sangat berperan. Penggunaan teori dan konsep tersebut dapat menjelaskan di dalam kondisi kausalitas suatu fenomena sejarah dan dapat memperkuat analisis masalah.¹⁶

Pareto, yang memusatkan perhatiannya pada masalah munculnya dan jatuhnya elite, menyatakan bahwa perubahan atau gerak sosial lebih mudah diamati pada kelas atas dari pada kelas bawah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa studi tentang perubahan yang bersifat historis sebagian besar akan berkisar di sekitar studi tentang perubahan elite.¹⁷

Mobilitas sosial adalah gerakan dari individu-individu, kelompok-kelompok dari satu posisi ke posisi sosial lainnya. Perubahan dalam posisi sosial seperti variasi-variasi pekerjaan, pendapatan kekayaan, dan kelas merupakan perhatian utama dari mobilitas sosial. Menurut Peter Burke, mobilitas sosial mempunyai tiga pengertian : (1) pergerakan ke atas atau ke bawah, atau jenjang sosial; (2) mobilitas ke dalam seseorang individu selama hidupnya dan mobilitas melebar selama beberapa generasi; (3) antara mobilitas individu dan kelompok.¹⁸ Sejalan dengan konsep mobilitas sosial ini, Marvin E. Olsen menyatakan bahwa mobilitas sosial dapat terjadi apabila seorang pelaku merubah satu statusnya atau lebih dalam pola stratifikasi yang lebih luas. Mobilitas sosial biasanya berjalan lambat karena kaum elite enggan melepaskan posisi kekuasaannya walaupun tidak dapat menolak perubahan.¹⁹ Dalam hubungan ini, Coxon menyatakan bahwa mobilitas sosial sebagai gerakan individu menuju satu dimensi tunggal yang bersifat vertikal dari semua status sosial, tempat status seseorang selalu dikaitkan dengan jabatan yang hendak dicapainya.²⁰ Miller menyatakan bahwa mobilitas sosial menyangkut tentang tingkah laku dalam satu jangkauan yang lebih luas, selain berupa gerakan-gerakan melalui jalur berdimensi vertikal, mobilitas sosial juga diperlihatkan oleh gerakan-gerakan perpindahan yang mengikuti jalur geografis, seperti gerak masyarakat dari satu bagian ke bagian lain dalam satu negeri, atau dari satu negeri ke negeri lain. Hal itu dapat pula diamati pada perpindahan penduduk dari desa ke kota atau daerah ke pusat pemerintahan kesultanan.²¹

PEMBAHASAN

Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, pada abad ke-20, mulai melakukan usaha-usaha dalam rangka pemberian perlindungan pada hak dan kepentingan penduduk pribumi. Hal ini dirasakan sebagai "kewajiban moral" untuk mengangkat derajat anak negeri yang dijajah.²² Salah satu usaha adalah membuka sekolah diperuntukan bagi masyarakat pribumi. Sekolah berfungsi sebagai katalisator bagi terwujudnya dua jenis elite, yaitu birokrat dan intelektual. Keduanya berasal dari tradisi pendidikan yang sama, tetapi berada dalam lingkungan politik dan sosial yang berbeda, juga mempunyai tempat atas susunan hierarki sosial, tetapi yang pertama lebih didukung oleh legitimasi politik, sedangkan yang lain oleh keunggulan ilmu.²³

Sebagai suatu lembaga masyarakat yang sengaja dibentuk untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, pendidikan telah membuka kesempatan baru untuk menyadarkan orang-orang Maluku Utara dalam mengembangkan dirinya dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Hal ini terlihat melalui penilaian baru terhadap pendidikan Barat yang diperkenalkan. Penilaian baru itu kemungkinan menimbulkan nilai ekonomis. Artinya melalui pendidikan bisa diperoleh pekerjaan dan pendapatan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi ini memberi implikasi positif bagi orang-orang Maluku Utara dalam memperbaiki status sosialnya.

Dalam perkembangannya, pendidikan Barat bukan hanya memberi sarana kemajuan bagi kebanyakan masyarakat, tetapi di sisi lain, dorongan untuk mengikuti pendidikan Barat adalah lebih diprioritaskan kepada anak-anak bangsawan. Hal ini dapat dilihat dari lulusan sekolah negeri yang berbahasa Belanda, sebagian besarnya berasal dari elite adat. Atas dasar itu, maka dalam rekrutmen tenaga-tenaga untuk mendapatkan pekerjaan, lulusan sekolah-sekolah Belanda dapat bekerja sebagai pegawai di kantor-kantor pemerintah.²⁴ Di samping itu pula, pada jawatan-jawatan pemerintahan terbuka untuk orang-orang Maluku Utara. Akibat akumulasi pendidikan inilah timbullah diferensiasi sosial, mobilitas massal, dan stratifikasi sosial baru bagi masyarakat.²⁵

Jenis jabatan yang mereka duduki itu paling tidak adalah *Bestuur Assistant*, dan *Hulpbestuur* atau kepala distrik. Jabatan ini merupakan jabatan yang langsung berhubungan dengan lapisan rakyat biasa untuk mengurus kepentingan Pemerintah Kolonial di daerah-daerah. Posisinya mengepalai sebuah kawasan kecil yang berada dalam ruang lingkup administrasinya. Dia menduduki strata tertinggi dalam struktur sosial. Sejalan dengan perluasan jabatan-jabatan Pemerintah Kolonial, maka

kegairahan orang-orang Ternate untuk menjadi pegawai negeri mulai tampak. Hal tersebut dalam perkembangan berikutnya menyebabkan terbentuknya elite modern atau yang menurut Robert van Niel, perluasan dan perkembangan elite yang lama (tradisional).²⁶

Pada mulanya, Maluku Utara hanya tersusun atas lapisan-lapisan sosial yang bersifat feodal komunal, seperti sultan dan kerabat, golongan bangsawan, dan pemangku agama (*bobato akhirat*). Namun, dalam perkembangan kemudian melalui proses modernisasi dan kolonisasi telah mengakibatkan struktur sosial masyarakat Maluku Utara bertambah kompleks atas munculnya kelompok-kelompok sosial baru berupa pejabat atau pegawai yang bekerja pada jawatan-jawatan pemerintahan.²⁷

Dalam kaitan dengan hal ini, secara umum Muttulada²⁸ mengkategorikan elite modern menjadi dua golongan. *Pertama*, kaum keturunan bangsawan yang setia kepada Belanda atau *Binnenland Bestuur Ambtenaar* yang lainnya berasal dari daerah-daerah gubernemen dan swapraja. *Kedua*, kaum *ambtenaren* lainnya yang terdiri atas cendekiawan berpendidikan formal, pemimpin-pemimpin pergerakan agama, sosial dan politik, serta pedagang dan pengusaha yang berhasil. Dua golongan elite inilah berlanjut terus sampai masuknya pendidikan Jepang. Setelah kemerdekaan, muncul elite-elite modern pula.

Munculnya pendidikan Barat memberi arti penting bagi masyarakat pribumi. Pendidikan Barat adalah sebagai lambang prestise dan menjadi keharusan dan standar bagi status yang tinggi. Di samping itu juga, ada lambang atau simbol-simbol yang lain, seperti garis keturunan, cara hidup, dan kekayaan juga menjadi standar dari status sosial. Pada dasarnya, pendidikan mempersiapkan orang secara lebih baik untuk memperoleh kemajuan dalam masyarakat modern.²⁹

Pemerintah Hindia Belanda awalnya memperkenalkan pendidikan Barat dan peruntukan bagi golongan-golongan tertentu, yang akan dijadikan kelompok sosial baru (elite baru), tetapi lama-kelamaan meluas juga ke kelompok-kelompok lain sehingga timbul kecenderungan-kecenderungan yang berpihak kepada masyarakatnya. Sebagian di antara mereka tampil sebagai tokoh pembangkit kesadaran nasional dan perjuangan kemerdekaan. Munculnya kesadaran itu tidak hanya dari lulusan sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi para elite Maluku Utara sudah membuka sekolah sendiri seperti Taman Siswa, al-Islamiyah School dan BAPMAN di Ternate, Wustha Mualimin dan Muhammadiyah masing-masing didirikan di Galela, Tobelo, dan Kao Halmahera Utara.³⁰

Pelaksanaan program di bidang pendidikan ini, baik yang berasal

dari sekolah Pemerintah Hindia Belanda maupun sekolah agama yang didirikan oleh pihak swasta, muncullah nilai-nilai baru menyangkut pandangan mereka tentang sekolah.³¹ Pencetus ide-ide pembaharuan untuk mengubah pola kehidupan yang masih kental dengan adat yang telah usang. Hal ini muncul dari kelompok-kelompok sosial yang terhimpun dalam organisasi sosial politik untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pandangan pembaharuan ini muncul dari tokoh-tokoh Maluku Utara melalui pengalaman mereka selama dalam pendidikan di luar Maluku Utara. Dari sinilah, timbul kesadaran untuk berjuang dengan menggunakan cara dan pola baru.³²

Sejalan dengan bangkitnya kesadaran nasional, banyak tokoh Maluku Utara yang terlibat dalam berbagai organisasi sosial-ekonomi dan politik, baik yang bersifat lokal maupun nasional, seperti Syarikat Islam, PNI, atau PSII, dan PKI, Muhammadiyah (1928), Taman Siswa (1937), Kepanduan Bangsa Indonesia (1936), Persatuan Padvinder Ternate, Annaser, (1937), KBI, dan Hizbul Wathan (1939). Organisasi sosial politik ini pada umumnya dikoordinasi dan dipimpin oleh tokoh-tokoh Maluku Utara yang mendapat didikan dari Pemerintah Hindia Belanda. Melalui organisasi ini, timbul kesadaran kebangsaan di antara tokoh-tokoh politik Maluku Utara dalam memperbaiki dan memperjuangkan nasib bangsanya.

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang pernah didirikan di Maluku Utara. Pada mulanya, didirikan di Galela, Haji Muhammd Amal menjabat sebagai ketua dan Haji B.S. Rauf sebagai sekretaris, serta anggota pengurus lainnya adalah Muhammad Saleh Saway, Danil Lasiji, Abdullah Joge Haji Abdul Jalil, dan lain-lain. Sampai tahun 1933, didirikan di tempat-tempat lain di Maluku Utara seperti Ternate dengan tokoh-tokoh kepengurusannya antara lain A.M. Petrana, Arifin Patty, Hasan Esa, Ibrahim Tolangara, dan Lutfi Haji Ibrahim; Tobelo dibentuk oleh Haji Abdullah Tjan. Pada tahun 1937, dibentuk di Morotai oleh Haji Umar Jama, Rajab Puradin, dan Musa. Kemudian pada tahun 1939, dibentuk di Tidore dan Weda oleh dr. Chasan Boesoirie.³³ Untuk memenuhi aspirasi politik dan sosial, orang Maluku Utara memasuki Muhammadiyah. Di samping melakukan gerakan keagamaan, Muhammadiyah di Maluku Utara juga turut dalam gerakan politik.³⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan memiliki arti penting bagi perjuangan masyarakat Maluku Utara di masa lalu. Artinya Muhammadiyah untuk daerah Maluku Utara dengan tokoh-tokohnya yang memiliki komitmen dan kesadaran kebangsaan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.³⁵

Mulai tahun 1937, putra-putra Maluku Utara yang mendapat

pendidikan baru, baik mereka yang berasal dari kalangan bangsawan maupun dari kalangan masyarakat biasa, dalam perkembangan selanjutnya, muncul para pemikir baru Maluku Utara membentuk suatu wadah yang bercorak lokal yang mereka namakan *Persatuan Padvinder Ternate* (PPT) dengan ketua Yusuf Tjoen, Annaser dengan ketuanya adalah A.S. Bachmid³⁶. Dalam perkembangannya, Gerakan Padvinder dan Annaser ini mendapat dorongan sambutan baik oleh masyarakat Maluku Utara. Adapun tujuan utama organisasi ini adalah untuk membina persatuan dan kesatuan menuju gerakan kesadaran nasional. Kemudian organisasi ini juga sebagai upaya mengubah adat kebiasaan yang telah usang yang mengekang perkembangan masyarakat Maluku Utara dan juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Melalui proses pendidikan, masyarakat tradisional mulai menerima unsur-unsur modernisasi, yaitu suatu proses yang mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Pendidikan di masa kolonial sangat penting dan mampu mewujudkan perubahan, baik dalam bentuk gagasan maupun ide-ide baru dari kelompok sosial yang mendapat pendidikan. Mereka juga sebagai pencetus gerakan pembaharuan.³⁷

KESIMPULAN

Pemerintah Hindia Belanda, dalam merekrut para pegawai atau pejabat untuk ditempatkan pada kantor-kantor pemerintah, selain memperhatikan faktor keturunan atau derajat bangsawan, juga melalui penyeleksian berdasarkan tingkat pendidikan, loyal, dan dapat bekerja sama dengan pemerintah. Tampaknya persyaratan ini lebih utama daripada yang lainnya sebab bila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka keberadaan yang bersangkutan tidak diakui sehingga dapat diberhentikan. Berbeda dengan birokrasi tradisional yang masih terikat dengan sistem feodalnya, birokrasi kolonial mengarah kepada profesionalisme dengan dimulainya lewat sekolah-sekolah.

Dalam perkembangannya, masyarakat Maluku Utara telah mengalami perubahan dalam berbagai bidang, baik materiil maupun spirituil. Perubahan ini sebagai akibat kebijakan pemerintah kolonial dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, sebagai tuntutan pembangunan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk pribumi.

Dampak bagi masyarakat Maluku Utara atas munculnya elite baru adalah perubahan orientasi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam interaksi sosial, baik antaranggota masyarakat pribumi, orang timur asing maupun antarorang Eropa. Di samping itu, elite baru menduduki posisi

penting dalam jawatan Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam posisi ini, para elite lokal dicanangkan program pembangunan di segala bidang, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya.

Sebagai suatu lembaga masyarakat yang sengaja dibentuk untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, pendidikan telah membuka kesempatan baru untuk menyadarkan orang-orang Maluku Utara dalam mengembangkan dirinya dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Hal ini terlihat melalui penilaian baru terhadap pendidikan Barat yang diperkenalkan. Penilaian baru itu kemungkinan menimbulkan nilai ekonomis. Artinya melalui pendidikan bisa memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi ini memberi implikasi positif bagi orang-orang Maluku Utara dalam memperbaiki statusnya.

CATATAN AKHIR

1 Everett M, *et al.*, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. Disarikan oleh Abdullah Hanafi (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 16.

2 Agus Salim, *Perubahan sosial Sketsa dan Teori Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 2-3.

3 Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan Zahara Deliar Noer (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 12.

4 R.T. Jangam, *Textbook of Political Sociology* (New Delhi-Bombay: Oxford dan IBH Publishing Co, 1982), hlm. 66.

5 Anak Agung Gde Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke-Kolonial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 6.

6 D.H. Fischer, *Historis Fallacies Toward a Logic of Historical Thought* (New York : Harper Torchbooks, 1979), hlm. 149-150.

7 M. Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800-1950 Jilid II* (Ternate: Unkhair, 2003), hlm. 289.

8 Batasan dan seluk beluk sejarah lokal dapat dipiriksa dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 1-36.

9 Teuku Ibrahim Alfian, (ed.), *"Tentang Metodologi Sejarah"* dalam Teuku Ibrahim Alfian, *Dari Babad Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm. 413; Gilbert J. Garragan, *A Guide to Historical Method* (Least Fordhan Road & New York: Fordhan UP, 1957), hlm. 33.

10 Kritik intern adalah kritik atas sumber yang ditujukan untuk menentukan apakah nilai dokumen ini memiliki kadar kredibilitas tinggi

(bersifat kualitatif), sedangkan kritik ekstern adalah kritik untuk mengetahui kebenaran masa pembuatan, analisis bahannya dan bentuk asli dokumen, dalam Garraghan, *op. cit.*, hlm. 168.

11 Setiap bagian memiliki hubungan dengan bagian yang lain, begitu juga terjalin hubungan tersebut secara keseluruhan. Lihat Robert F. Berkhofer, Jr., *A Behavioral Approach to Historical Analysis* (New York: The Free Press, 1969), hlm. 188.

12 Bambang Purwanto, "Interpretasi dan Analisis dalam Sejarah". Makalah pada Penataran Metodologi Sejarah yang diselenggarakan Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 16-26 Pebruari 1994), hlm. 7.

13 Hasan dan Kontjaraningrat, "Beberapa Azas Metodologi Ilmiah" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), hlm. 8-23; lihat Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 1-4.

14 Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 14-21.

15 Sebagai referensi baca tulisan W.F. Wertheim dengan judul "The Sociological Approach" dalam *An Introduction to Indonesian Historiography* yang diterjemahkan oleh Soedjatmoko, *et al*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1975), hlm. 344-358.

16 Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan....op.cit.*, hlm. 57.

17 Untuk menonjolkan peranan bangsa Indonesia dalam zaman kolonial, kita perlu menggunakan pendekatan multidimensional dan menggunakan teori-teori serta konsep dari cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya, sehingga dengan sejarah analisis kita dapat mengungkapkan micro-historis yang dengan sendirinya memuat kearifan bangsa Indonesia tidak ditingkat nasional, tetapi ditingkat regional dan lokal, dalam Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran....op.cit.*, hlm. 2. Sebagai referensi lihat Henry Jacoby, *The Bureaucratization of The Word* (Bekerley: University of California Press, 1973), hlm. 212.

18 Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 93-94.

19 Marvin E. Olsen, *The Process of Social Organization* (New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co, 1968), hlm. 197-199.

20 A.P.M. Coxon and C.L. Jones, *Social Mobility* (Middlesex: Prenguin Education, 1975), hlm. 18.

21 S.M. Miller, "The Concep and Measurement of Mobility" dalam

A.P.M. Coxon and C.L. Jones, *ibid.*, hlm. 21-22.

22 I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Orderwys in Nederlandssch-Indie* (Groningen-Batavia: J.B Wolters Uitgevers Mij, 1938), hlm. 40.

23 Sartono Kartodirdjo, (et al.), *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid V, Yusmar Basri, (ed.) (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 135.

24 ANRI, *Memori van Overgeve Residen Ternate* K.A. James, 1925, hlm.33; *Mailrapport* No.209/19.

25 Menurut Robert van Niel, terjadinya mobilitas sosial melahirkan elite masyarakat yang baru, sebenarnya bukan elite baru, tetapi suatu perkembangan dan perluasan dari elite yang lampau (tradisional) dalam Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (terj. Zahara Deliar Noer) (Jakarta : Pustaka Jaya), hlm. 70-75.

26 Robert van Niel, *op. cit.*, hlm. 235.

27 Di antara mereka yang menduduki posisi penting dalam berbagai bidang seperti Iskandar Muhammad Djabir yang bekerja di Jawatan Kereta Api SS atau *Staats Spoor* di Bandung. Pada tahun 1925 ia magang di Kesultanan Bima dan menjadi *Ambtenaar terbeschikking*. Tahun 1926 ia bersama Muchsin Usman Syah magang di Sumbawa dan Iskandar Muhammad Djabir juga bekerja di Kantor Residen atau *Residentie Kantoer*. *Indische Gids* 1930, Jilid 52, hlm. 580; lihat Irza Arnita Djafar, *Biografi Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah*. Tesis Paka Sarjana (S2) (Jakarta : Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999), hlm. 44-46.

28 W.H. van Halsdingen, "*Bestuur en Rechtspraak*": *Daar Werd Wet Groots Verricht-Nederlandch-Indie th eeuw* (A'dan Elsevier, 1941), hlm. 471.

29 Sartono Kartodirdjo, "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial" dalam *Lembaran Sejarah*, No. 4 Desember 1969, hlm. 56.

30 M. Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafar, *op. cit.*, hlm. 110.

31 Haji Muhammad Amal menjadi pelopor kelompok pembaharuan dalam modernisasi, Suryadi dan M.S. Dzhahir mendirikan Taman Siswa di Ternate. A.S. Bachmid sebagai tokoh pendiri Al-Islamiyah School di Ternate. Periksa Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafar, *op. cit.*, hlm. 25-126.

32 Putra Maluku Utara lulusan sekolah Pemerintah Hindia Belanda, seperti Iskandar Muhammad Djabir, Muchsin Usman Syah, M.A. Kamarudin, Daniel Bohang, Haji Muhammad Amal, Haji Ngade, A.M. Petrana, Arifin Patty serta lainnya. Periksa M. Adnan Amal dan Arza Arnyta Djafar, *ibid.*

33 Ibid.

34 E. Katoppo, *Nuku: Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara* (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 43.

35 Ibid., hlm. 52.

36 M. Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafarloc cit.

37 O'Neil William F, *Educotional Philosophies*. (California : Company Inc. Santa Nonica, 1981), hlm.43.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

ANRI, *Memori van Overgeve*, Mailrapport No.209/19. Residen Ternate K.A. James, 1925.

ANRI, Ternate Seri 2 No. reel film 27, *Memori van Overgave*, Karesidenan Ternate W.A.Hovenkamp, 1931

Indische Gids 1930, Jilid 52.

B. Sumber Leksikografi (dokumen yang diterbitkan)

Adnan, M. Amal dan Irza Arnyta Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800-1950 (Jilid II)*, Ternate: Unkhair, 2003.

Anak Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke-Kolonial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Agus Salim, *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 2002.

Bambang Purwanto, "Interpretasi dan Analisis dalam Sejarah", Makalah pada Penataran Metodologi Sejarah yang diselenggarakan Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 16-26 Pebruari 1994.

Berkhofe, Jr, Robert F. *A Behavioral Approach to Historical Analisis New York: The Free Press*, 1969.

Everett, M, et al. *Memasakatkan Ide-Ide Baru*. Disaraikan oleh Abdullah Hanafi, Surabaya: Usaha Nasional ,1981.

Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Crab, *De Moluksche Eiland, Reise van Z.E. den Gouverneur Generaal Ch.F. Fahud door den Molukschen Arcipel* (Batavia: Lange, 1862.

Clercq, F.S.A, *Bijdragen tot de Kennes der Residentie Ternate*, Leiden: Brill, 1890.

Coser A Lewis dan Bernard Rosenbarg (Penyadur), *Power and Status Sociological Theory* New York: The Macmellan Company, 1964.

D.H, Fischer, *Historis Fallactes Toward a logec of Historical Thought*, New York : Haper Torchooks, 1979.

- Djoko Suryo, *et al.*, *Agama dan Perubahan Sosial Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*. Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, 2001.
- Djoko Suryo, "Pendidikan, Defferensiasi Kerja dan Pluralisme Sosial. *Dinamika Sosial-Ekonomi 1900-1990*", makalah disampaikan pada Kongres Sejarah Nasional Indonesia di Jakarta tanggal 12-15 Nopember 1996
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Eisenstadt "Bureaucracy, Bureacratization and Deureaucration" dalam *adminitive Science Quarterly*, no.4 1959.
- Everett, M, *et al.*, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. Disarikan oleh Abdullah Hanafi (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
- E, Kotopo, *Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Garraghan, G, *A Guide To Historical Method*, New York : Fordham University Press, 1957.
- Hasan Koentjaraningrat (ed)., *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1977.
- Ibrahim Alfian, (ed.), " *Tentang Metodologi Sejarah*" Babad Sampai Sejarah Kritis, Yogyakarta : UGM Press, 1992.
- Irza Arnita Djafar, *Biografi Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah*. Tesis Paca Sarjana (S2). Jakarta : Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999.
- Jones C.L. dan Coxon A.P.M. Coxon, A.P.M. Coxon, *Social Mobility* (Middlesex:Prengu Education, 1975)
- Jangam, R.T, *Textbook of Political Sosiology* (New Delhi-Bombay:Oxford dan IBH Publising Co, 1982),
- Jacoby, Henry, *The Bureaucratization of The Word*, Bekerley: Universitasy of California Press, 1973.
- Olsen E, Marin, *The Process of social organzation*, (New Delhi Bombay Calcutta: Oxford & IBH Publishing Co, 1968.
- Sartono Kartodirdjo, *Modern Indonesia : Tradition and Transformation Socio-Historical Prespective*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.
- _____, *Pendekatan Ilmu Sosial Metodologi Sejarah*, Jakarta: Pustaka Tama, 1992.
- _____, *et al. Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, Yusnar Basri, (ed.), Jakarta: Departemene dan Kebudayaan, 1975.
- _____, "Struktur Sosial dari Masyarakat tradisional dan Kolonial" dalam *Lembaran Sejarah*, No. 4 Desember 1969.
- Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah University Press, 1996.
- Van Niel, Robert , *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Terj. Zahara Deliar Noer), Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Van Halsdingen, W.H. van, " *Bestuur en Rechtspraak*": Daar Werd Wet Groots Verricht-Nederlandsch-Indie th eeuw, Ad'dan Elsevier, 1941.